

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Kedudukan Konstitusional Wadah
Tunggal Organisasi Notaris terhadap
organisasi Notaris di Indonesia

NAMA MAHASISWA : Dian Christianto

NIM : 217162034

KATA KUNCI : Organisasi Notaris

ISI ABSTRAK :

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi, Pasal tersebut menerangkan bahwa satu-satunya wadah organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia. Ketentuan tersebut adalah bersifat inperatif atau memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi. Namun kehendak konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Kedudukan Notaris dalam persamaan Hukum yang mempunyai hak asasi yang sama dengan hak-hak asasi manusia yang mana setiap Notaris berhak atas kebebasan berserikat dan membentuk sebuah Organisasi Notaris yang lain selain Ikatan Notaris Indonesia. Penulis berkesimpulankalaupun kemudian hanya Ikatan Notaris Indonesia yang diakui Pemerintah, persoalannya bukan lagi pada konstitusionalitas, masalah ini sudah menyangkut implementasi undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang tentang Jabatan Notaris itu terbukti tidak sesuai dengan kehendak Konstitusi.